



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN  
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE/ 17 /VII/2023**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INTERKONEKSI BAST  
NON KONTRAKTUAL PADA SAKTI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

**1. Dasar:**

- Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-4/PB/PB.8/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penyampaian Tata Cara Pengajuan Permohonan Interkoneksi BAST Non Kontraktual pada SAKTI.

**2. Sehubungan dengan dasar diatas, dalam rangka pengajuan Interkoneksi sistem dalam rangka aktivasi fitur Interkoneksi unggah ADK BAST Non Kontraktual telah dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan negara melalui implementasi SAKTI dengan pengembangan dan penyempurnaan fitur Interkoneksi BAST Non Kontraktual. Penjelasan informasi terkait hal tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:**

- a. Fitur Interkoneksi sistem pada Aplikasi SAKTI terkait proses penginputan data BAST Non Kontraktual yang berasal dari transaksi pembelian barang persediaan secara *batch* telah tersedia dengan menggunakan unggah ADK (format .ZIP).
- b. Fitur Interkoneksi BAST Non Kontraktual sebagaimana dijelaskan pada huruf a diperuntukkan bagi satuan kerja dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum;
  - 2) Memiliki *load*/kapasitas transaksi dalam jumlah relatif besar dengan mempertimbangkan jumlah transaksi per bulan dan besaran pagu; dan
  - 3) Telah memiliki/menggunakan sistem yang dirancang untuk membentuk ADK BAST Non Kontraktual sesuai dengan standar kamus data yang diterima SAKTI.
- c. Dalam hal pengajuan permohonan Interkoneksi sistem, satuan kerja menyampaikan surat permohonan Interkoneksi kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan (Direktorat SITP) dengan tembusan kepada Kapuslapbinkuhan Kemhan beserta dokumen pendukung sesuai format pada lampiran Surat Edaran ini.
- d. Selanjutnya satuan kerja mengirimkan *softcopy* surat permohonan Interkoneksi dan sampel ADK *output* aplikasi yang diInterkoneksikan dengan menggunakan kata sandi sementara kepada Direktorat SITP melalui saluran surat elektronik (email) pada [hai.djpb@kemenkeu.go.id](mailto:hai.djpb@kemenkeu.go.id) atau melalui portal HAI-DJPb pada laman [www.hai.kemenkeu.go.id](http://www.hai.kemenkeu.go.id) dan dikirimkan ke email Puslapbinkuhan Kemhan pada [puslapbinkuhankemhan123@gmail.com](mailto:puslapbinkuhankemhan123@gmail.com).

- e. Direktorat SITP menerima pengajuan permohonan Interkoneksi dan melakukan verifikasi atas surat permohonan beserta kelengkapannya serta melakukan pengujian atas sampel data yang dilampirkan.
  - f. Dalam hal permohonan Satker disetujui, Direktorat SITP mengirimkan notifikasi kepada PIC aplikasi Satker pemohon melalui informasi yang tertera pada surat pengajuan permohonan Interkoneksi sistem. Notifikasi yang disampaikan berisi persetujuan permohonan dan pemberian kata sandi permanen yang akan digunakan pada ADK BAST Non Kontraktual Satker pemohon.
  - g. Dalam hal verifikasi sebagaimana huruf f tidak disetujui, Direktorat SITP menyampaikan notifikasi kepada PIC aplikasi Satker pemohon untuk diperbaiki dan/atau ditindaklanjuti.
  - h. Diagram Alur proses pengajuan permohonan Interkoneksi BAST Non Kontraktual dengan menggunakan ADK beserta contoh surat permohonan Interkoneksi terdapat pada lampiran Surat Edaran ini.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama/Wilayah dan Satker di jajaran UO masing-masing.
  4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2023

Kepala  
Pusat Pelaporan dan Pembinaan  
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.  
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

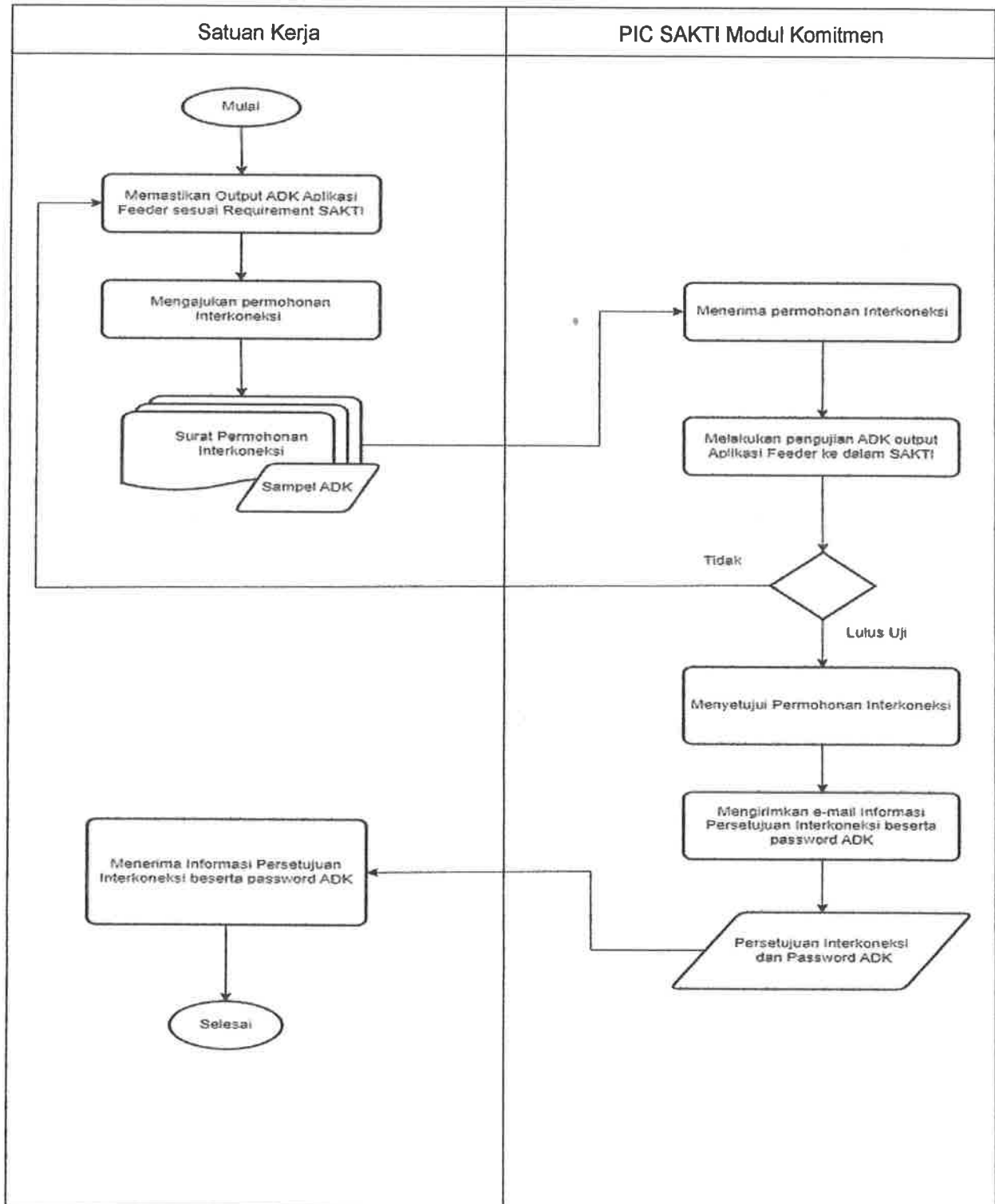
Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan

Lampiran  
 Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan  
 Nomor : SE/ 17 /MII/2023  
 Tanggal : 11 Juli 2023

**PENGAJUAN PERMOHONAN INTERKONEKSI BAST NON KONTRAKTUAL**

**1. Diagram Alur Pengajuan Permohonan Interkoneksi**



**2. Template Surat Permohonan Interkoneksi Sistem memuat informasi berikut:**

No	Poin	Contoh/Keterangan
1	Perihal Surat	Permohonan Interkoneksi Aplikasi (....) dengan SAKTI Modul (...) pada Menu (...)
2	Tujuan Surat	Yth. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan di Jakarta
3	Isi Surat (memuat latar belakang atau tujuan dari permintaan Interkoneksi data)	Sehubungan dengan persiapan pembangunan aplikasi ....pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI...pada tahun 2023, dengan ini kami mohon untuk dapat diberikan izin akses Interkoneksi BAST Non Kontraktual atas Satuan Kerja ...
4	Profil Aplikasi yang akan diInterkoneksikan	Berisikan informasi: a. Nama Aplikasi b. Deskripsi Umum Aplikasi c. Ruang Lingkup Fungsionalitas Aplikasi d. Database yang digunakan e. Bahasa Pemrograman/ <i>Framework</i> yang digunakan f. Pengguna Aplikasi g. Estimasi Jumlah <i>User</i> Pengguna Aplikasi
5	PIC Aplikasi	Informasi PIC Aplikasi: a. Nama, b. NIP/NRP, c. Unit Organisasi, d. Satuan Kerja, e. No.HP, f. Alamat Email Kedinasan
6	Model Interkoneksi	Upload data (ADK)
7	Data/ModulTerkait	SAKTI Modul Komitmen, menu Interkoneksi BAST Non Kontraktual
8	PenandatangananSurat	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
9	Lampiran	Petunjuk Teknis/Tangkapan layar Aplikasi Feeder terkait pembentukan ADK yang diInterkoneksikan
10	Sampel Data	Sampel data atas ADK yang dihasilkan oleh Aplikasi <i>Feeder</i> , ADK terdiri dari 3 file .CSV yang disatukan dalam format .ZIP ( agar diberi password sementara default: <b>sakti123</b> )

## 3. Contoh Surat Permohonan Interkoneksi:

## KOP SURAT

Nomor : .....

Hal : Permohonan Interkoneksi .....

Lampiran : Satu berkas

Yth. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan  
di Jakarta

Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi .... (Diisi Nama Aplikasi yang diInterkoneksikan ke SAKTI) pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dengan ini kami mohon untuk dapat diberikan izin akses Interkoneksi BAST Non Kontraktual atas Satuan Kerja .... (kode\_Satker).

Berikut terlampir profil sistem yang akan diInterkoneksikan dan model Interkoneksi yang diajukan:

Profil	Nama Aplikasi	(Diisi Nama Aplikasi yang diInterkoneksikan ke SAKTI)
	Deskripsi Umum	(Diisi Deskripsi/penjelasan tentang fungsi/gambaran umum aplikasi)
	Ruang Lingkup Fungsionalitas Aplikasi	(Ruang lingkup. Cth: Pencatatan atas transaksi pembelian persediaan obat-obatan dan alat kesehatan)
	Database yang digunakan	(Database yang digunakan cth: Oracle/SQL/MsAccess/Excel/dll)
	Bahasa Pemrograman/ Framework yang digunakan	(Bahasa Pemrograman cth: Java/PHP/dll)
	Pengguna Aplikasi	(Diisi pengguna aplikasi)
	Estimasi Jumlah User Pengguna Aplikasi	(Diisi perkiraan jumlah user pengguna)
PIC	Nama	(Diisi Nama PIC aplikasi)
	NIP/NRP	(Diisi NIP/NRP)
	Unit Organisasi	(Diisi Nama Unit Organisasi)
	Satuan Kerja	(Diisi Nama Satker)
	No. HP	(Diisi Nomor HP)
	e-mail	(Diisi alamat email)
Data / Modul Terkait	(Diisi informasi Modul yang diInterkoneksikan. Cth: BAST Non Kontraktual / Modul Komitmen)	

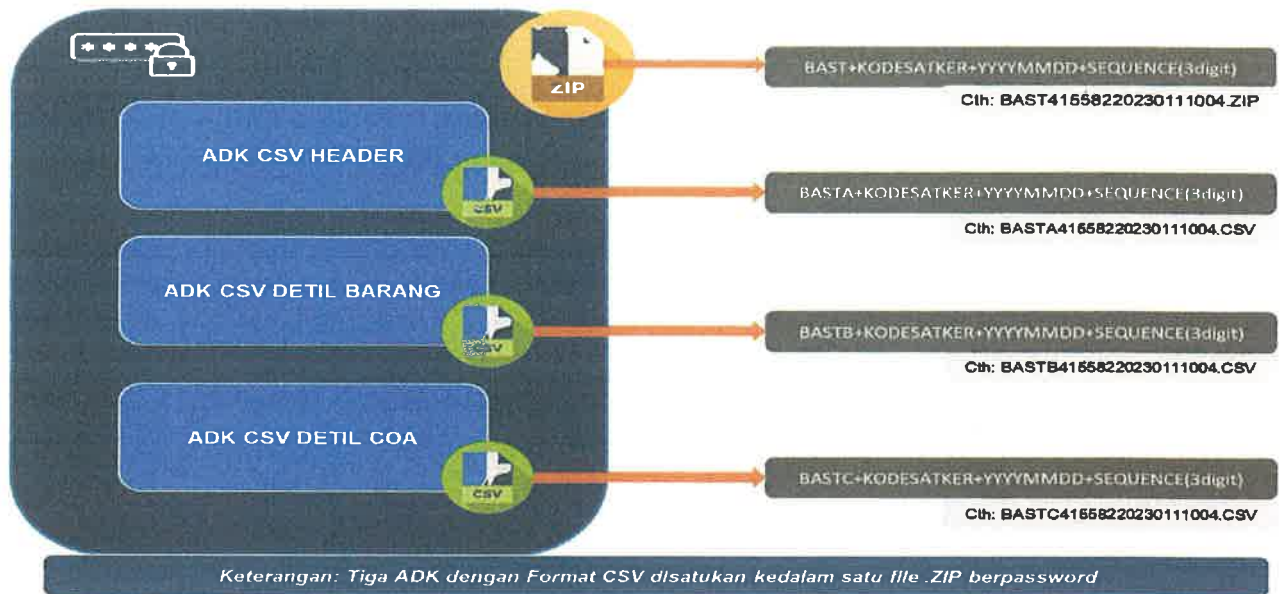
Adapun model Interkoneksi yang diajukan yaitu menggunakan metode unggah Arsip Data Komputer (ADK) ke dalam Aplikasi SAKTI. Kebenaran dan keabsahan data yang diunggah merupakan tanggung jawab kami sebagai pemilik data. Bersama ini terlampir Petunjuk Teknis terkait pembentukan ADK pada Aplikasi .... (diisi aplikasi feeder). Sampel data telah kami sampaikan melalui tiket Hai ditujukan ke Tim SAKTI Modul Komitmen dengan nomor referensi .... tanggal ....

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

.....

#### 4. Struktur dan Kamus Data ADK



#### Kamus Data ADK 1 (Header)

No	Kolom	Tipe Data & Panjang Karakter	Mandatory/Opsional ?	Keterangan	Contoh Sample Data
1	KODE_SATKER	VARCHAR2(255)	Mandatory	kode satker	626397
2	KODE_TAHUN_ANGGARAN	VARCHAR2(255)	Mandatory	tahun anggaran transaksi	2022
3	NO_DOKUMEN	VARCHAR2(50)	Mandatory	nomor dokumen bast	00402174/CC/32/30/06/2022
4	TGL_DOKUMEN	DATE	Mandatory	tanggal buku BAST	2022-06-28 00:00:00.000
5	TGL_DOKUMEN2	DATE	Mandatory	tanggal dokumen BAST	2022-06-28 00:00:00.000
6	URAIAN_DOKUMEN	VARCHAR2(255)	Mandatory	uraian BAST	0001-Pembayaran CC atas nama ANDI BASKORO/4365830050133074 Pembelian Mesin Absensi
7	KATEGORI	VARCHAR2(2)	Mandatory	1 BAST Barang LS Non Kontrak/ Pengesahan Belanja BLU	1
8	NAMA_PENERIMA	VARCHAR2(255)	Opsional	nama penerima barang bast	ANDI BASKORO
9	NO_REKENING	VARCHAR2(50)	Mandatory	nomor rekening supplier bendahara satker (tipe 2)	9829928299
10	KODE_MATA_UANG	VARCHAR2(255)	Mandatory	mata uang	IDR
11	NILAI_BAST	NUMBER(19,2)	Mandatory	nilai total bast	13061000
12	NO_DIPA	VARCHAR2(50)	Mandatory	nomor dipa	DIPA-093.01.1.626397/2022
13	TGL_DIPA	DATE	Mandatory	tanggal dipa	2021-11-17 00:00:00.000
14	NILAI_KURS	NUMBER(19,2)	Mandatory	nilai kurs	1
15	KODE_COA	VARCHAR2(255)	Mandatory	Kode coa 12 segment	626397.175.532111.09301BC.3850EBA.A00000001.00000.1.0154.2.000000.000000
16	NPWP	VARCHAR2(255)	Opsional	NPWP yang terdaftar pada referensi WP/WB modul Bendahara	123456789012345

#### Kamus Data ADK 2 (Detil Barang)

No	Kolom	Tipe Data & Panjang Karakter	Mandatory/Opsional ?	Keterangan	Contoh Sample Data
1	KODE_BARANG	VARCHAR2(255)	Opsional	Kode barang/persediaan 16 digit	3050105017123456
2	HARGA_SATUAN	NUMBER(19,2)	Mandatory	harga satuan barang/persediaan	1000000
3	JUMLAH_BARANG	NUMBER(19,0)	Opsional	Jumlah barang	4
4	KODE_UAKPB	VARCHAR2(255)	Mandatory	Kode UAKPB/UAPKPB	015080199527010000KP



### Kamus Data ADK 3 (Detil CoA)

KAMUS DATA DAN DATA SAMPEL					
No	Kolom	Tipe Data & Panjang Karakter	Mandatory/Optional ?	Keterangan	Contoh Sample Data
1	KODE_COA	VARCHAR2(255)	Mandatory	Kode coa 16 segment	626397.175.532111.093018C.3850EBA.A 000000001.00000.1.0154.2.000000.0000 00.963.053.0B.000548
2	NILAI COA DETAIL	NUMBER(21,2)	Mandatory	Nilai pendetilan dalam RP	13061000
3	NILAI VALAS DETAIL	NUMBER(21,2)	Mandatory	Nilai pendetilan dalam valas	13061000
4	VOL SUB OUTPUT	NUMBER(21,4)	Mandatory	Volumè level suboutput	450

Kepala  
Pusat Pelaporan dan Pembinaan  
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.  
Brigadir Jenderal TNI